

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- 256 /PB/2014

TENTANG

PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMENT AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, dipandang perlu untuk menetapkan Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMENT AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR.

- PERTAMA : Pemutakhiran Kodefikasi Segment Akun pada Bagan Akun Standar yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi:
- a. Penambahan Segment Akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- b. Penjelasan Uraian atas Penambahan Segment Akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 tentang Kodefikasi Segment Akun pada Bagan Akun Standar, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.


KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 8 Mei 2014.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri/Pimpinan Lembaga;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 2014

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

PENAMBAHAN SEGMENT AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

1. PENAMBAHAN AKUN NERACA

a. Akun Tanah Sebelum Disesuaikan-BLU

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
131	TANAH	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1314	Tanah Sebelum disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
13141	Tanah Sebelum disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
131411	Tanah Sebelum disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan-BLU

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
132	PERALATAN DAN MESIN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1324	Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
13241	Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
132411	Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

c. Akun Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan-BLU

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
133	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1334	Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
13341	Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
133411	Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

d. Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan- BLU

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
134	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1344	Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
13441	Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
134411	Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

e. Akun Aset Tetap Renovasi-BLU

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
135	ASET TETAP LAINNYA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1352	Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
13522	Aset Tetap Renovasi - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
135221	Aset Tetap Renovasi - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

f. Akun Selisih Kurs dari Hibah

Kode Akun	Uraian	Keterangan
311	EKUITAS DANA LANCAR	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
3117	Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
31171	Selisih Kurs	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
311715	Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi Kas Hibah Langsung	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

2. PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN

a. Akun PNPB di Lingkup Kementerian Kehutanan

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
421	PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4214	Pendapatan Kehutanan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
421422	Pendapatan Hasil <i>Silvopastural</i> dan <i>Silvofishery</i> Kehutanan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
421443	Pendapatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
421444	Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan air dan Energi Air	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
42145	Pendapatan Jasa Perbenihan dan Kehutanan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
421451	Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
421452	Pendapatan dari Sertifikasi Benih	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
421453	Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/ Mengambil/ Mengangkut Satwa Liar/ Mengambil/ Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup, Termasuk Sarang Burung Walet di Kawasan Konservasi	Kode Akun Lama, Uraian Akun Baru
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan	Kode Akun Lama, Uraian Akun Baru
423739	Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
42375	Pendapatan Denda	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan denda terkait kegiatan pidana	Kode Akun Lama, Uraian Akun Baru
42376	Pendapatan Denda II	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423765	Pendapatan Denda Administrasi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
42377	Pendapatan Izin Pemanfaatan Hutan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423771	Pendapatan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423772	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IUPJL)	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423773	Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Pendapatan yang Berasal dari Peradilan TPPU

Kode Akun	Uraian	Keterangan
423	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42342	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

Kode Akun	Uraian	Keterangan
423421	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Ditetapkan Pengadilan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423422	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

c. Akun Pendapatan Denda dalam Rangka TSA

Kode Akun	Uraian	Keterangan
423	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42375	Pendapatan Denda	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423759	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Penerimaan Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	Kode Akun Lama, Uraian Akun Baru

d. Akun Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
423	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42376	Pendapatan Denda II	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423766	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

3. PENAMBAHAN AKUN BELANJA/BEBAN

a. Akun Belanja Pencairan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kode Akun	Uraian	Keterangan
521	BELANJA BARANG	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5212	Belanja Barang Non Operasional	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
52121	Belanja Barang Non Operasional	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
521216	Belanja Pencairan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara

Kode Akun	Uraian	Keterangan
521	BELANJA BARANG	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5212	Belanja Barang Non Operasional	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
52121	Belanja Barang Non Operasional	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
521217	Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

c. Akun Belanja Kontribusi Organisasi Internasional dan VGF

Kode Akun	Uraian	Keterangan
521	BELANJA BARANG	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5217	Belanja Kontribusi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
52171	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
52172	Belanja Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (<i>Viability Gap Fund</i>)	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
521721	Belanja Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (<i>Viability Gap Fund</i>)	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

d. Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden

Kode Akun	Uraian	Keterangan
527	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5271	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
52711	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
527111	Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
527112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	Kode Akun dan Uraian Akun Baru


Kode Akun	Uraian	Keterangan
527113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

5. PENAMBAHAN AKUN TRANSITORIS

a. Akun Surplus BLU

Kode Akun	Uraian	Keterangan
815	PENERIMAAN TRANSITO	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8151	Penerimaan Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
81512	Penerimaan Transito-BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

PENJELASAN URAIAN ATAS PENAMBAHAN SEGMENT AKUN
 PADA BAGAN AKUN STANDAR

AKUN	PENJELASAN
131411	<p>Tanah Sebelum disesuaikan - BLU</p> <p>Digunakan untuk mencatat tanah yang dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Namun Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang belum menyampaikan laporan BMN - Tanah ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.</p>
132411	<p>Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan - BLU</p> <p>Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dengan masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Namun Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang belum menyampaikan laporan BMN - peralatan dan mesin ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.</p>
133411	<p>Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan - BLU</p> <p>Digunakan untuk mencatat seluruh gedung dan bangunan yang dibeli, diperoleh atau dibangun Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Namun Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang belum menyampaikan laporan BMN - Gedung dan Bangunan ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.</p>
134411	<p>Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan - BLU</p> <p>Digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh Badan Layanan Umum serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Namun Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang belum menyampaikan laporan BMN - Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.</p>
135221	<p>Aset Tetap Renovasi - BLU</p> <p>Digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik entitas akuntansi Badan Layanan Umum, namun digunakan dalam kegiatan operasional entitas akuntansi yang melakukan renovasi.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan; 2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi; 3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset.
311715	<p>Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi Kas Hibah Langsung</p> <p>Digunakan untuk mencatat selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda atas pendapatan yang berasal dari hibah.</p>
421422	<p>Pendapatan Hasil <i>Silvopastural</i> dan <i>Silvofishery</i> Kehutanan</p> <p>PNBP yang berasal dari hasil <i>Silvopastural</i> dan <i>Silvofishery</i> Kehutanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)</p>


AKUN	PENJELASAN
421443	Pendapatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan
	PNBP yang berasal dari hasil penjualan karbon atas Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
421444	Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan air dan Energi Air
	PNBP yang berasal dari Iuran Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.05)
421451	Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan
	Pendapatan yang diperoleh dari Iuran dan perpanjangan Izin pemasukan dan pengeluaran benih dari dan ke luar negeri. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.04)
421452	Pendapatan dari Sertifikasi Benih
	Pendapatan yang diperoleh dari setoran Sertifikasi Sumber Benih termasuk Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit Generatif, Mutu Bibit Kultur Jaringan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.04)
421453	Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan
	Pendapatan yang diperoleh dari Iuran Pengumpulan dan Pengunduhan Benih dan Anakan. Masuk Bagian Anggaran Kemeterian Kehutanan (BA 029.04)
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/ Mengangkut Satwa Liar/ Mengambil/ Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup, termasuk sarang burung walet di kawasan konservasi
	Pendapatan yang diterima dari iuran kepada pemegang izin menangkap, mengambil dan mangangkut satwa liar dan tumbuhan alam termasuk sarang burung walet di kawasan konservasi dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian daripadanya yang tidak dilidungi undang-undang dan yang dilindungi undang. Masuk Bagian Anggaran Kemeterian Kehutanan (BA 029.05)
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penggantian harga minimum yang seharusnya dibayarkan oleh pemungut dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman serta ganti rugi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
423739	Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam
	Pendapatan dari Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam yang diterima setiap bulan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.05)
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Denda Terkait Kegiatan Pidana
	Pendapatan yang diterima dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Penerimaan dari Denda Post Audit, tata usaha Provisi Sumber Daya Hutan dan Denda terkait kegiatan pidana. Masuk Bagian Anggaran Kemeterian Kehutanan (BA 029.03)
423765	Pendapatan Denda Administrasi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)

AKUN	PENJELASAN
	Pendapatan yang diterima dari Denda Administrasi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) seperti penyimpangan dokumen/ kegiatan bidang usaha tumbuhan dan satwa liar, dan Penyimpangan terhadap izin usaha di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.05)
423771	Pendapatan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
	Pendapatan dari Iuran Izin pemanfaatan kawasan hutan per tahun. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
423772	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IIUPJL)
	Pendapatan dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IIUPJL) per tahun. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
423773	Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam
	Pendapatan yang diterima dari Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.05)
423421	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Ditetapkan Pengadilan. Masuk Bagian Anggaran BA Kejaksaan Agung (BA 006) dan Bagian Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
423422	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang. Masuk Bagian Anggaran BA Kejaksaan Agung (BA 006) dan Bagian Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
423759	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Penerimaan Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan/kurang limpah penerimaan negara; denda tidak membuka loket penerimaan negara pada waktu yang ditetapkan; denda karena menolak setoran penerimaan negara dari wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan nasabahnya; denda karena mengenakan biaya kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor atas jasa layanan perbankan; dan denda kepada bank cabang yang melakukan penerimaan negara namun belum memperoleh izin sebagai Bank/PO persepsi.
423766	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk juga imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
521216	Belanja Pencairan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Pencairan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan peraturan perundangan mengenai PTN BH (PP No.58/2013 dan PMK No.165/PMK.02/2014), hanya digunakan pada Bagian Anggaran Kementerian Pendidikan (BA 023).
521217	Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
	Digunakan untuk mencatat belanja atas denda keterlambatan pembayaran atas tagihan kepada negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Negara atas Tagihan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Belanja Negara.
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>
	<p>Digunakan untuk mencatat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99); dan • Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99)
521721	Belanja Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (<i>Viability Gap Fund</i>)
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang merupakan dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99)
527111	Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
527112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
527113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

AKUN	PENJELASAN
815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO *KS*